

Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 di Berita *Online*: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Ideology in the use of covid-19 terms in online news: Norman Fairclough's critical discourse analysis

Akhmad Samsuri^{1,*}, Widyatmike Gede Mulawarman², dan Yusak Hudyono³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman

Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

^{1,*}Email: samsmpn22@gmail.com; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6580-282X>

²Email: widyatmike@fkip.unmul.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0996-3757>

³Email: yusak.hudyono@fkip.unmul.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2201-2438>

ARTICLE HISTORY

Received 10 May 2021

Accepted 2 June 2022

Published 2 August 2022

KEYWORDS

Ideology, covid-19 terms, Norman Fairclough.

KATA KUNCI

Ideologi, istilah-istilah covid-19, Norman Fairclough.

ABSTRACT

*This study aims to describe the structure of the text (text dimension), discourse practice (dimension of social practice), and sociocultural practice (sociocultural dimension) against the use of COVID-19 terms in online news. The research method used is qualitative descriptive. The critical discourse analysis approach Norman Fairclough used to find the depth of meaning of news texts containing COVID-19 terms. The term data about COVID-19 is taken from three websites, namely *Bisnis.com*, *Kompas.com*, and *Liputan6.com*. Based on the results of the analysis, it was concluded that, first, the text structure in the form of advisories, information, and education about events (events) increasing COVID-19 cases and policy actions taken by the government to reduce COVID-19 cases. Second, discourse practices include the identity of the government and society. Third, the dimension of sociocultural practice indicates policies that impact: (a) the marginalization of society, (b) social dominance, and (c) social wrong because the policies implemented are not to the conditions of society. The results of this study are expected to provide a correct understanding of the use of COVID-19 terms in online news so that the public can be more critical in reading news in online media.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur teks (dimensi teks), praktik wacana (dimensi praktik sosial), dan praktik sosiokultural (dimensi sosiokultural) terhadap penggunaan istilah-istilah COVID-19 pada berita *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan untuk menemukan Ideologi penggunaan istilah-istilah COVID-19 dalam berita *online*. Data istilah-istilah tentang COVID-19 diambil dari 3 *website*, yaitu *Bisnis.com*, *Kompas.com*, dan *Liputan6.com*. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa, pertama, struktur teks berbentuk himbauan, informasi, edukasi seputar peristiwa (*event*) meningkatnya kasus COVID-19 dan tindakan (*action*) kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kasus COVID-19. Kedua, praktik Wacana meliputi identitas pemerintah dan masyarakat. Ketiga, dimensi praktik sosial budaya menunjukkan kebijakan yang berdampak pada (a) marginalisasi masyarakat, (b) dominasi sosial, dan (c) *social wrong* karena kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar terhadap penggunaan istilah-istilah COVID-19 dalam berita *online* sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam membaca berita di media *online*.

To cite this article:

Samsuri, A., Mulawarman, W. G., & Hudyono, Y. (2022). Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 di Berita *Online*: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(3), 603—618. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.442>



A. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 mendatangkan perubahan di segala bidang kehidupan di dunia. Salah satu perubahan yang paling tampak adalah meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap berbagai platform media *online* (Ahmed et al., 2020). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh bahwa persentase penggunaan media *online* di masyarakat yang tadinya 18,2% sebelum pandemi meningkat menjadi 52,3% pada masa pandemi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa padami kebiasaan masyarakat mulai bergeser yang tadinya *offline* menjadi *online*. Media sosial merupakan salah satu media *online* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan mendapatkan berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan modern karena berbagai informasi disebar ke masyarakat sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan hasil pengetahuan yang dibentuk oleh media (Maulana, 2020). Sejak masa pandemi COVID-19 media sosial menjadi ajang komunikasi antar penikmat berita khususnya berita tentang isu seputar perkembangan COVID-19. Berita isu COVID 19 mendominasi di media sosial baik pro dan kontra. Salah satu wujud pro dan kontra dari masyarakat adalah terkait munculnya istilah-istilah baru COVID-19 karena pembentukan istilah yang diambil dari kata serapan bahasa asing. Berita COVID menjadi isu kontemporer dan dijadikan tren kajian masa kini sehingga dalam penelitian ini penulis menyempitkan kajian ini dari segi penggunaan istilah-istilah COVID-19 yang muncul dalam berita *online*.

Perubahan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 menimbulkan adanya ketidakberesan sosial (*social wrong*) yang terjadi di masyarakat. Ketidakberesan sosial adalah suatu sistem yang merugikan masyarakat meliputi adanya kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi maupun kurangnya kebebasan dan rasisme (Maravia et al., 2021). Salah satu ketidakberesan sosial yang paling tampak pada masa pandemi COVID-19 adalah munculnya berbagai berita hoaks di media sosial terkait berita tentang COVID-19. Berita hoaks merupakan berita palsu yang dibuat dengan sengaja untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Berita hoaks tentang COVID-19 memiliki berbagai dampak khususnya pada kesehatan dan mentalitas masyarakat (Abd-Alrazaq et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat menghadapi wabah COVID -19 yang datang secara tiba-tiba (Rayani & Purqoti, 2020). Berdasarkan bidang infodemiologi yang telah mempelajari pola informasi di Web dan di media sosial selama setidaknya 18 tahun, pandemi COVID-19 menimbulkan infodemik media sosial pertama yang telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya meresahkan tetapi juga menimbulkan korban jiwa akibat dari informasi yang tidak benar dalam mengatasi penyebaran COVID-19 (Ahmad & Murad, 2020).

Berita tentang berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 lebih banyak dimunculkan dari pada dampak dari kebijakan yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa berita terbentuk dari adanya kekuatan yang dominan (Eriyanto, 2015). Munculnya istilah-istilah baru tentang COVID-19 dipandang sebagai sesuatu yang alamiah tanpa melihat berbagai praktik sosial dibalik istilah-istilah tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dianggap sebagai cara yang benar untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kebenaran kebijakan tersebut selalu dimuat di media terus-menerus hingga terjadi suatu kewajaran atau yang biasa disebut sebagai *common sense*.

Kebenaran di media merupakan suatu kebenaran yang bukan lahir secara alamiah, tetapi kebenaran tersebut sengaja dibentuk oleh kekuatan kelompok yang dominan untuk

mengonstruksi pikiran masyarakat untuk menganggap bahwa kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang ada di media. Ketidakberesan sosial di masyarakat dapat teratasi dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terhadap penggunaan istilah-istilah tentang COVID-19 dalam berita *online*. Untuk memahami suatu berita dibutuhkan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulis.

Objek dari analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) adalah bahasa, sama halnya dengan analisis wacana (*Discourse Analysis*). Namun dalam analisis wacana kritis, tidak hanya aspek bahasa saja yang diteliti namun termasuk pula konteks yang menyertainya (Fitriani et al., 2021). Peran analisis wacana kritis dalam sebuah media adalah tentang bagaimana mengembangkan fakta yang ada di lapangan dengan menganalisisnya ke dalam praktik sosial yang berkembang di masyarakat (Putri et al., 2022). Salah satu teori yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis berita adalah teori dari Norman Fairclough. Dalam menganalisis berita Fairclough membagi analisis wacana menjadi tiga dimensi: *text*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* (Asad et al., 2021; Rokhmansyah et al., 2022). Analisis penggunaan istilah-istilah COVID-19 dalam berita *online* dengan menggunakan model Norman Fairclough nantinya akan memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap istilah-istilah baru tentang COVID-19.

Ideologi pada umumnya dimaknai sebagai suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Raymond William ideologi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah yaitu: Pertama, ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. kedua, ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dibuat dari ide palsu atau kesadaran palsu. Ketiga, ideologi merupakan istilah yang digunakan menggambarkan sebuah produksi makna. Jika mengacu pada pendapat tersebut maka munculnya ideologi dari penggunaan istilah-istilah covid-19 mengacu pada ketiga ranah tersebut. Hanya saja dibutuhkan analisis yang menyeluruh agar adanya ideologi yang dimunculkan dari penggunaan istilah-istilah covid-19 dapat dimaknai dengan jelas

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan salah satu bagian dari kajian analisis wacana. Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dimaknai hanya sebagai studi bahasa. AWK melihat wacana sebagai bentuk dari praktik sosial sehingga perlu diperhatikan kriteria yang holistik dan kontekstual. Kualitas suatu wacana kritis akan selalu dinilai dari segi kemampuan menempatkan teks pada konteks yang utuh. Wacana tidak lagi dipahami sekadar serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi sebagai sebuah gagasan, konsep atau efek yang dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga memengaruhi cara berpikir dan bertindak (Hwita, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini harus dilakukan untuk membongkar ideologi di balik munculnya penggunaan istilah-istilah COVID-19 yang ada di berita *online*. berita seputar COVID-19 didekati dengan analisis tekstual (dimensi teks), analisis praktik wacana (dimensi praktik sosial), dan di dimensi praktik sosial budaya (dimensi sosiokultural). Dalam konteks ini penggunaan istilah-istilah COVID-19 dimaknai sebagai pernyataan entitas dan relasi sosial, sekaligus mengonstruksi kaitan antara keduanya. Tujuan dalam penelitian analisis penggunaan istilah-istilah COVID-19 dalam berita *online* dengan menggunakan model Norman Fairclough nantinya akan memberikan

kontribusi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap istilah-istilah baru tentang COVID-19.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pisau bedah analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari terwujudnya makna fenomena sosial dalam masyarakat. (Bungin, 2007, hal. 23). Penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kata-kata (deskripsi), oleh karena itu digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. studi deskriptif adalah studi untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi gejala yang ada. tujuan penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan yang ada dalam lingkungan masyarakat (Payuyasa, 2017). Metode deskriptif sendiri memiliki pengertian, yaitu penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis serta menyajikan data informasi yang sebenarnya. Penelitian ini bisa menaruh citra yang kentara tentang objek yang diteliti buat menarik konklusi berdasarkan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena ingin mendeskripsikan berbagai, praktik sosial dan ideologi dari istilah-istilah tentang COVID-19 yang muncul pada berita. Istilah-istilah tersebut dijadikan sebagai data yang akan dianalisis menggunakan teori Norman Fairclough. Sumber penelitian diambil dari berita *online* yang berisi pemberitaan tentang COVID-19. Data penelitian ini berupa penggunaan istilah-istilah tentang COVID-19 yang muncul dalam berita *online*. Sumber data pada penelitian ini diambil dari 3 media daring, yaitu Bisnis.com, Kompas.com dan Liputan6.com.

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

No.	Nomor Data	Judul	Sumber	Tanggal Tayang
1	Berita 1	Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Balikpapan Perintahkan Lockdown Terbatas	Bisnis.com	8 Januari 2021
2	Berita 2	Jokowi Anggap PSBB Kebijakan Tepat Hadapi Wabah Covid-19, Bukan Lockdown	Kompas.com	7 Mei 2020
3	Berita 3	Infografis Eropa Lockdown Covid-19, Indonesia Bertahan	Liputan6.com	27 Maret 2021
4	Berita 4	Nadiem: Wilayah PPKM Level 1-3 Boleh Belajar Tatap Muka Tebatas	Liputan6.com	23 Agustus 2021

Metode analisis data dilakukan sesuai dengan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, yakni (1) dimensi teks, (2) dimensi praktik sosial, dan (3) dimensi sosiokultural Pertama, menganalisis teks secara linguistik, dengan memperhatikan leksikal, semantik, struktur kalimat, kohesi dan konsistensi antar kalimat. Kedua, praktik wacana dilakukan melalui analisis penciptaan, konsumsi, dan penyebaran teks. Ketiga, praktik sosiokultural dianalisis dengan menggunakan tiga tingkatan level, yaitu (1) situasional, (2) institusional, dan (3) sosial.

¹ <https://kalimantan.bisnis.com/read/20210108/407/1340220/kasus-covid-19-melonjak-wali-kota-balikpapan-perintahkan-lockdown-terbatas>

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/07/10533621/jokowi-anggap-psbb-kebijakan-tepat-hadapi-wabah-covid-19-bukan-lockdown>

³ <https://www.liputan6.com/news/read/4516796/infografis-eropa-lockdown-covid-19-indonesia-bertahan>

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/4638507/nadiem-wilayah-ppkm-level-1-3-boleh-belajar-tatap-muka-terbatas>

C. Pembahasan

1. Dimensi Tekstual

Pada tahap analisis tekstual aspek representasi dipilah menjadi representasi dalam anak kalimat (klausa), representasi dalam kombinasi anak kalimat (klausa), dan representasi dalam rangkaian antarkalimat. Berdasarkan analisis tekstual akan terlihat bagaimana istilah-istilah COVID-19 digunakan dalam berita *online*. Dimensi teks (struktur mikro) dianalisis secara linguistik, yaitu dengan melihat kosakata, semantik, dan sintaksis (Cenderamata & Darmayanti, 2019). Berikut adalah analisis tekstual dari wacana berita yang diambil dari *Bisnis.com*, *Kompas.com*, dan *Liputan6.com*.

Berita 1

“Kasus COVID-19 Melonjak, Wali Kota Balikpapan Perintahkan Lockdown Terbatas”

Berita 1 diterbitkan oleh *Bisnis.com* mengandung istilah baru, yaitu “*lockdown* terbatas”. Secara kebahasaan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk dari kata majemuk karena istilah tersebut terdiri dari dua kata yang menimbulkan makna baru. Kata *lockdown* merupakan kata yang berarti mengunci. Jika arti tersebut dimaknai dalam situasi pandemi maka *lockdown* berarti mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Sedangkan kata terbatas merupakan kata yang diambil dari kata dasar batas yang berarti suatu pemisah antara satu sisi dengan sisi yang lain. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi “*lockdown* terbatas” maka istilah tersebut dapat dimaknai sebagai suatu aturan untuk mengunci sebagian akses atau memberi batasan di sebagian titik di suatu wilayah.

Penggunaan istilah “*lockdown* terbatas” direpresentasikan sebagai aturan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di wilayah Balikpapan. Bentuk praktik sosial dari istilah “*lockdown* terbatas” adalah pembatasan aktivitas warga, pengetatan kembali disiplin protokol kesehatan, kewajiban mengenakan masker. Dalam memaparkan istilah *lockdown* terbatas *Bisnis.com* tidak menjelaskan bahwa bentuk pembatasan aktivitas warga secara mendetail padahal pada kenyataannya akibat dari pembatasan aktivitas warga pemerintah kota Balikpapan memberlakukan penutupan jalan di berbagai titik khususnya jalan utama di kota Balikpapan. Selain itu pemberlakuan batas berjualan pedagang kaki lima juga ikut dibatasi. Bahkan dari adanya *lockdown* terbatas pedagang yang melanggar batas waktu berjualan yang ditentukan dikenakan denda. Berbagai bentuk praktik sosial dari istilah *lockdown* terbatas banyak tidak ditampilkan dalam berita yang dibuat oleh *Bisnis.com*. Penggunaan istilah *lockdown* terbatas yang digunakan oleh *Bisnis.com* ditampilkan hanya sebagai aturan yang digunakan dalam mengurangi penyebaran virus corona.

Adanya relasi yang dibangun *Bisnis.com* dalam pemberitaan *lockdown* terbatas adalah wartawan berusaha memberikan data peningkatan kasus COVID-19 dari satgas penanganan COVID-19 yang ada di kota Balikpapan. Selain itu pembuat berita juga membangun relasi dengan Rizal Effendi selaku Wali Kota Balikpapan. Adanya relasi yang dibangun dalam berita bertujuan untuk mengonstruksi pikiran pembaca untuk ikut serta membenarkan adanya kebijakan *Lockdown* terbatas merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

Identitas wartawan dalam berita ini selain sebagai pekerja media juga sebagai pengamat jalannya penyebaran COVID-19. Wartawan pada awalnya menempatkan identitasnya sebagai pengamat berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 tetapi dalam berita ini terlihat memihak kepada kebijakan yang dilakukan oleh wali kota Balikpapan terlihat dari banyaknya data-data yang ditampilkan untuk mengonstruksi pikiran pembaca untuk ikut serta membenarkan bahwa kebijakan *Lockdown* terbatas merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

Berita 2

“Jokowi Anggap PSBB Kebijakan Tepat Hadapi Wabah COVID-19, Bukan Lockdown”

Berita 2 diterbitkan oleh Kompas.com mengandung istilah PSBB. PSBB merupakan suatu singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Istilah PSBB dimaknai sebagai suatu kebijakan dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam berita yang dibuat oleh Kompas.com istilah PSBB ditampilkan sebagai tindakan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Munculnya kata *beruntung* sebelum kata PSBB dijadikan untuk mendefinisikan bahwa ada keuntungan dari penggunaan PSBB. Istilah *lockdown* juga dimunculkan sebagai bahan perbandingan bahwa adanya PSBB diasumsikan sebagai kebijakan yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau *lockdown*. Pada kombinasi anak kalimat menjelaskan bahwa masyarakat diuntungkan dengan adanya penggunaan istilah PSBB karena masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa hanya saja dibatasi. Pembatasan yang dimaksud adalah melakukan pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar orang. Pengertian PSBB yang dimunculkan diatasi diperkuat dengan menghadirkan peran presiden Jokowi yang ikut mendukung adanya PSBB. Pada berita ini tidak ditemukan adanya pendapat masyarakat yang setuju maupun tidak dengan adanya penggunaan kebijakan PSBB. Pembuat berita hanya menampilkan pendapat orang nomor satu yang paling dominan di masyarakat guna memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa kebijakan PSBB tidak hanya dilakukan dalam wilayah perkotaan tetapi dalam wilayah perkampungan atau desa juga harus dilakukan.

Wartawan berusaha membangun relasi dengan Joko Widodo selaku presiden Indonesia sebagai partisipan untuk menegaskan bahwa kebenaran untuk mengurangi penyebaran COVID-19 itu dengan diberlakukannya PSBB bukan *lockdown*. wartawan tidak membangun relasi dengan masyarakat sebagai partisipan. Pendapat masyarakat tidak ditampilkan dalam berita tersebut sebagai pemberi respons terhadap pemberlakuan kebijakan PSBB. Masyarakat hanya ditampilkan sebagai pihak yang diuntungkan karena kebijakan yang diambil adalah PSBB bukan *lockdown*. Pada teks berita dua pada intinya dalam berita dua lebih menonjolkan dampak baik terhadap pemberlakuan PSBB.

Identitas wartawan dalam berita ini selain sebagai pekerja media juga sebagai pengamat kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19. Wartawan pada awalnya mengamati keadaan yang terjadi pada saat terjadinya PSBB kemudian menuliskannya dalam suatu teks berita agar masyarakat mengetahui bahwa PSBB merupakan kebijakan yang tepat untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Identitas yang dibangun Kompas.com menempatkan diri terhadap pihak yang mendukung adanya kebijakan PSBB sedangkan partisipan yang ditampilkan sebagai pihak yang

mengembangkan informasi yang bersumber dari fakta. Pada berita ini wartawan mengidentifikasi bahwa pemberlakuan PSBB kebijakan yang tepat dibandingkan harus *lockdown*.

Berita 3

“Infografis Eropa Lockdown COVID-19, Indonesia Bertahan”

Berita 3 diterbitkan oleh Liputan6.com. Dalam berita tersebut, penggunaan istilah *Lockdown* dijadikan sebagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh negara-negara di Eropa dalam mengurangi penyebaran virus corona sementara Indonesia tidak menerapkan sistem *Lockdown* dan anjuran untuk vaksinasi.

Data 3.1

Liputan6.com, Jakarta - Lonjakan kasus positif COVID-19 memaksa sejumlah negara di Eropa lockdown lagi. Sebaliknya, Indonesia bertahan tidak lockdown.

Pada kalimat data 3.1 terdapat kalimat perbandingan yang menampilkan antara kebijakan yang terjadi di Eropa dan di Indonesia. Kalimat perbandingan tersebut menggunakan konjungsi “*sebaliknya*” untuk membedakan bahwa kebijakan yang diambil untuk mengurangi penyebaran virus corona antara Indonesia dan Eropa memiliki keterbalikan padahal lonjakan kasus penyebaran virus corona di Eropa dan di Indonesia hampir sama. Indonesia memilih tidak melaksanakan *lockdown* tetapi lebih memilih menjalankan vaksinasi untuk mewaspadaai terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19. Berikut kalimat yang ditulis dalam berita.

Data 3.2

Pemerintah Indonesia mewaspadaai terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19 di sejumlah negara di Eropa. Salah satu caranya dengan menggenjot vaksinasi COVID-19.

Istilah *vaksinasi* merupakan bentuk nomina, yaitu *vaksin* yang berarti produk yang mampu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi orang tersebut dari penyakit atau infeksi tertentu. Bentuk nomina tersebut berubah menjadi bentuk verba karena ditambahkan *nasi* di belakangnya sehingga istilah vaksinasi dapat dimaknai sebagai kegiatan/tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Penggunaan istilah vaksinasi pada kalimat data 3.2 menunjukkan suatu kebijakan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk mewaspadaai penyebaran virus corona yang terjadi di sejumlah negara di Eropa.

Data 3.3

Masyarakat Indonesia pun diingatkan harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai terjadi peningkatan penularan COVID-19 seperti di Eropa.

Pada kalimat data 3.3 terdapat representasi kombinasi anak kalimat, yaitu *Masyarakat Indonesia pun diingatkan harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan* yang dihubungkan dengan menggunakan kata “*jangan sampai*”, dengan anak kalimat

selanjutnya, yaitu *terjadi peningkatan penularan COVID-19 seperti di Eropa*. Representasi yang ditampilkan dari kombinasi anak kalimat, yaitu bahwa selain vaksinasi pemerintah Indonesia juga mengingatkan bahwa masyarakat juga harus tetap disiplin dan menjalankan protokol kesehatan guna mengurangi penyebaran virus corona. Berikut susunan infografis yang ditampilkan.



Gambar 1. Infografis Kebijakan Negara-Negara di Eropa pada Saat Pandemi

Pada infografis penggunaan judul Eropa *Lockdown* Indonesia bertahan menampilkan perbedaan kebijakan yang di diambil oleh negara Eropa dan di Indonesia. Di bawah judul tersebut tertulis negara-negara di Eropa yang menerapkan *lockdown* untuk mengurangi penyebaran virus corona. Upaya Indonesia dalam penyebaran COVID-19, yaitu dengan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat / PPKM Mikro dan vaksinasi. Dari kebijakan tersebut Joko Widodo mengatakan bahwa "Sekarang kita sudah turun. Akan terus kita turunkan. Hati-hati jangan kita lengah". Kalimat tersebut mempertegas bahwa adanya penerapan PPKM dan Vaksinasi menurunkan penyebaran virus corona.

Rangkaian berita serta infografis yang ditampilkan dalam berita menempatkan hubungan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara-negara yang ada di Eropa. Dalam hal ini pembaca dihubungkan dengan suasana penyebaran COVID-19 dan kebijakan yang diambil dalam mengurangi penyebaran virus tersebut. Pada berita yang ditampilkan bahwa infografis yang ditampilkan dijadikan sebagai fakta bahwa pengambilan kebijakan melakukan vaksinasi lebih efektif ketimbang melakukan *lockdown*.

Identitas wartawan dalam berita ini selain sebagai pekerja media juga sebagai pengamat jalannya suatu kebijakan yang diberlakukan di negara-negara Eropa untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam infografis yang ditampilkan wartawan lebih mendukung adanya pembenaran bahwa kebijakan vaksinasi merupakan langkah yang

tepat yang diambil pemerintah dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19 dalam gelombang ketiga. Hal tersebut terlihat dari adanya kalimat yang ditulis dalam berita.

Berita 4

Nadiem: Wilayah PPKM Level 1—3 Boleh Belajar Tatap Muka Terbatas

Berita 4 diterbitkan oleh Liputan6.com. Dalam berita tersebut, pada PPKM level 1—3 Nadiem Makarim, selaku menteri pendidikan, meminta dukungan kepada komisi X untuk membantu menyuarakan kepada 63 persen sekolah yang ada pada wilayah PPKM 1—3 segera melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Rangkaian anak kalimat dalam berita ini terdapat pada kalimat data 4.1.

Data 4.1

Vaksinasi bukan kriteria untuk pembukaan sekolah, kondisi untuk membuka sekolah dia ada di PPKM level 1,2,3. Itu saja,” katanya.

Pada kalimat data 4.1 penggunaan istilah vaksinasi bukan menjadi syarat untuk diadakan pembelajaran tetapi ditegaskan di akhir kalimat bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan jika sekolah berada pada PPKM level 1—3. *Katanya* merujuk kepada Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan yang menganjurkan adanya pembelajaran kepada sekolah yang ada pada PPKM Level 1—3. Representasi ujaran tersebut tentunya memiliki keterbalikan dengan kalimat di bawah ini.

Data 4.2

“Tapi vaksinasi guru jadi kewajiban untuk tatap muka. Kalau guru sudah vaksin, dia wajib memberi opsi tatap muka,” tandasnya.

Pada data 4.2, kalimat pertama Nadiem mengatakan bahwa vaksinasi bukan sebagai syarat diadakannya pembelajaran tatap muka tetapi pada kalimat selanjutnya vaksinasi justru diwajibkan bagi guru yang ingin mengadakan tatap muka. Dalam rangkaian anak kalimat merepresentasikan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka akan diadakan jika siswa dan guru melakukan vaksinasi. Wartawan berusaha membangun relasi terhadap menteri pendidikan, yaitu Nadiem Makarim. Dalam berita ini wartawan memosisikan dirinya sebagai pemberi informasi bahwa vaksinasi bukan sebagai syarat untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Kalimat yang ditampilkan dapat dilihat pada data 4.3.

Data 4.3

“Vaksinasi bukan kriteria untuk pembukaan sekolah, kondisi untuk membuka sekolah dia ada di PPKM level 1, 2, 3. Itu saja,”

Wartawan tidak berusaha mendukung adanya kebijakan untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat pembelajaran tatap muka karena dalam kalimat yang ditampilkan wartawan, guru sebagai partisipan yang harus melakukan vaksinasi untuk melakukan kegiatan tatap muka. Secara tidak langsung inti dari pemberitaan tersebut wartawan tidak memihak pada siapa pun hanya saja Nadiem Makarim selaku partisipan ditampilkan sebagai seseorang yang mewajibkan adanya vaksinasi untuk persyaratan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Pada tahap identitas hal yang diperhatikan ialah posisi wartawan menempatkan dirinya pada sebuah peristiwa. Dalam pemberitaan tersebut, khalayak dihubungkan dengan adanya sebuah kebijakan yang disampaikan Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan bahwa sebelum melakukan pembelajaran tatap muka guru wajib divaksin. Dalam konteks ini wartawan menempatkan dirinya sebagai pihak yang menyebarkan informasi terkait adanya kegiatan vaksinasi.

Data 4.4

“Tapi vaksinasi guru jadi kewajiban untuk tatap muka. Kalau guru sudah vaksin, dia wajib memberi opsi tatap muka,” tandasnya.

Dalam konteks kalimat data 4.4, Liputan6.com sebagai pihak yang mendukung kebijakan Nadiem Makarim untuk mengharuskan vaksinasi kepada sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka. Dalam berita tersebut identitas penulis juga sangat terlihat dari kalimat yang ditampilkan bahwa dalam kutipannya mengatakan bahwa pihak DPR juga harus mendukung adanya vaksinasi sebagai syarat dilakukannya kegiatan pembelajaran tatap muka.

2. Dimensi Praktik Wacana

Praktik kewacanaan berhubungan dengan produksi dan pemaknaan beberapa proses diskursif. Tahap kedua analisis wacana kritis ini dilakukan dengan langkah menginterpretasikan hubungan antara produksi dan interpretasi beberapa proses diskursif. Dua hal yang menjadi bahan kajian, yaitu (a) pemaknaan teks, dan (b) pemaknaan konteks. Dalam interpretasi teks ada empat level wilayah interpretasi, yakni (a) wujud lahir ujaran, (b) makna tuturan, (c) koherensi lokal, dan (d) struktur teks. Untuk menginterpretasi konteks ada dua tingkat interpretasi, yaitu (a) konteks situasional, dan (b) konteks antarteks.

Kondisi sosial yang diungkapkan dalam teks merupakan bentuk hierarki, oposisi biner, yaitu atas dan bawah. Pemerintah, berperan pada posisi atas yang memberikan kebijakan sedangkan posisi bawah diduduki oleh masyarakat yang harus mematuhi kebijakan yang digunakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Peran masing-masing identitas memiliki struktur sosial berbeda ketika memproduksi ideologi berusaha memengaruhi masyarakat sebagai pengonsumsi ideologi.

Teks tentang penggunaan istilah-istilah COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kendali interaksional. Karena itu, terlihat identitas pemerintah sebagai pengatur alur ideologi dalam teks. Adapun masyarakat sebagai pengonsumsi teks berada dalam posisi mematuhi ideologi tersebut. Paparan tersebut dapat ditemukan dalam kutipan-kutipan keempat berita berikut.

Berita 1

Saya minta segera camat, lurah, berkoordinasi dengan musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika), dengan para tokoh masyarakat, untuk menerapkan Lockdown terbatas di lingkungannya,” kata Walikota Rizal Effendi, Kamis (7/1/2021).

Berita 2

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), kita beruntung karena sejak awal pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, bukan karantina wilayah atau Lockdown.

Berita 3

Pemerintah Indonesia mewaspadaai terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di sejumlah negara di Eropa. Salah satu caranya dengan menggenjot vaksinasi Covid-19.

Berita 4

“Dalam paparannya, Nadiem menyampaikan 63 persen sekolah di Indonesia yang berada di PPKM Level 1,2,3 sudah bisa membuka sekolah untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM).”

Interpretasi pada kutipan keempat berita di atas, menunjukkan adanya aktor yang mempunyai kuasa untuk menerapkan *lockdown* terbatas, PSBB, PPKM dan PTM adalah pemerintah. Sementara, aktor yang harus mematuhi kebijakan tersebut adalah masyarakat. Terdapat tatanan yang tidak sepadan dalam sebuah struktur sosial. Selain itu, terdapat pengaruh kuat yang didistribusikan kepada masyarakat, oleh pemerintah. Berikut kutipan-kutipan keempat berita yang menunjukkan hal tersebut.

Berita 1

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, seluruh kecamatan kembali masuk zona merah. Tertinggi Kecamatan Balikpapan Utara dengan 252 kasus positif dan Kecamatan Balikpapan Selatan 244 kasus positif.

Berita 2

“Artinya, dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi memang dibatasi,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5/2020)

Berita 3

Masyarakat Indonesia pun diingatkan harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai terjadi peningkatan penularan Covid-19 seperti di Eropa.

Berita 4

Nadiem menyebut banyak pihak terkejut dengan jumlah sekolah yang boleh PTM. Karena itu ia meminta DPR membantu agar mensosialisasikan agar PTM segera dimulai di 63 persen sekolah tersebut.

Kutipan-kutipan keempat berita di atas menunjukkan bahwa pemerintah sebagai aktor utama dalam penerapan kebijakan. Pemerintah dibantu oleh aktor-aktor lain untuk menjaga stabilitas ideologi. Konstruksi ideologi didukung oleh jajaran pemerintah, seperti presiden,

menteri, walikota, dan camat. Sedangkan masyarakat meliputi peserta didik, guru, warga, pengusaha, dan pemilik instansi yang tidak mempunyai kapasitas luas.

3. Dimensi Sosio-kultural

Analisis praktik sosiokultural merupakan suatu penyelidikan tentang apa yang terjadi dalam kerangka sosial budaya di masyarakat. Hubungan teks dengan praktik sosiokultural tidak secara langsung tetapi dibatasi dengan adanya dimediasi praktik wacana. Eriyanto (2015) menyatakan bahwa Fairclough membuat tiga tingkat analisis dalam praktik sosiokultural, yang terdiri atas tingkat situasional, institusional, dan sosial.

Pertama, situasional. Setiap teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas atau unik sehingga teks dapat menjadi berbeda dengan teks yang lain. Apabila teks dipahami sebagai bagian dari tindakan, maka sesungguhnya tindakan tersebut adalah bentuk dari respons pada konteks sosial. Kedua, institusional. Institusional merupakan dimensi yang melihat adanya pengaruh institusi atau organisasi dalam praktik produksi wacana. Ketiga, sosial. Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Fairclough menegaskan bahwa wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh perubahan masyarakat. Kalau aspek situasional lebih mengarah pada waktu atau suasana yang mikro (konteks peristiwa saat teks berita dibuat), aspek sosial lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, ekonomi atau sistem budaya secara keseluruhan.

Pemaparan dimensi sosiokultural pada berita tentang COVID-19 dapat dilihat dari beberapa kutipan berita berikut.

Berita 1

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Balikpapan Perintahkan Lockdown Terbatas

Berita 2

Jokowi Anggap PSBB Kebijakan Tepat Hadapi Wabah Covid-19, Bukan Lockdown

Berita 3

Lonjakan kasus positif Covid-19 memaksa sejumlah negara di lagi. Sebaliknya, Indonesia bertahan tidak Lockdown

Berita 4

Nadiem: Wilayah PPKM Level 1-3 Boleh Belajar Tatap Muka Terbatas

Berdasarkan keempat judul berita di atas, berita dimunculkan pada situasional yang sama, yaitu pada kondisi masyarakat yang diresahkan oleh meningkatnya kasus penularan COVID-19. Dengan adanya lonjakan kasus tersebut pemerintah merupakan pihak yang beradaptasi dan menjembatani dengan mengeluarkan berbagai solusi berupa kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Pada kutipan di atas juga menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membuka paradigma logis kepada masyarakat tentang kondisi yang dialami. Hal tersebut ditandai dengan kata dan frasa: *kasus*, *melonjak*, *wabah*, dan *kebijakan yang tepat*. Interaksi para aktor yang melakukan praktik sosial ini mengalami

gesekan. Untuk menghindari kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dibuatlah kalimat-kalimat peredam. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut.

Berita 1

Pada awal tahun 2021 ini terjadi lonjakan penyebaran kasus Covid-19 hingga 4 kali lipat. Kondisi itu membuat Walikota Balikpapan Rizal Effendi memerintahkan pembatasan-pembatasan sosial di kecamatan dan kelurahan yang tercatat tinggi jumlah warganya yang tertular.

Berdasarkan latar belakang pengetahuan masyarakat yang berbeda, respons terhadap kondisi kewacanaan tentang COVID-19 juga berbeda, sehingga ideologi yang didistribusikan berbenturan dengan konsep pembawa ideologi awal. Dalam penelitian analisis wacana kritis dengan dimensi sosiokultural ditemukan (1) bentuk marginalisasi terhadap masyarakat, (2) dominasi pemerintah sebagai pemangku kekuasaan berkaitan dengan ideologi yang diterapkan, dan (3) fenomena praktik sosiokultural tersebut menimbulkan sesuatu yang salah (*social wrong*).

Anomali perilaku yang ada dalam masyarakat dapat terlihat dari berbagai bentuk perubahan di masyarakat terutama perubahan kegiatan sosial karena waktu dan jarak yang dibatasi. Penyebab perubahan perilaku ini merupakan proyeksi dari resistensi masyarakat terhadap ideologi pemerintah. Penyebabnya adalah inkonsistensi pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang diproduksi untuk mengurangi pelonjakan kasus COVID-19. Masyarakat menjadi korban dari dampak penerapan kebijakan. Hal ini terlihat dari pendekatan yang dilakukan oleh aparat pelaksana regulasi berupa ancaman dan hukuman. Kebijakan dianggap tidak efektif oleh masyarakat.

Titik akumulasi dari resistensi masyarakat terhadap pemerintah adalah bentuk-bentuk perlawanan terhadap kebijakan. Hal ini berwujud pada sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintah, perlawanan terhadap satgas gabungan yang sedang beroperasi, dan sikap apatis masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Potret praktik sosial dan bentuk interaksi sosial semacam ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan kewacanaan sosiopolitik dan sosiokultural.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa teks penggunaan istilah-istilah COVID-19 dalam berita *online* memiliki unsur sebagai berikut. Pertama, dimensi teks meliputi interpretasi teks yang saling berkolaborasi berdasarkan lingkup diskursif, yaitu bentuk-bentuk kebijakan seperti *Lockdown* terbatas, PSBB, PPKM, dan Vaksinasi (ideologi penguasa). Mediasi untuk meredam penolakan berupa kalimat-kalimat yang memiliki substansi edukasi, imbauan, dan informasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yang ingin diterapkan oleh pemerintah.

Kedua, dimensi praktik sosial meliputi hierarki sosial atas dan bawah. Terminologi “atas” berkaitan dengan pemerintah beserta jajarannya, memiliki dominasi ideologi kekuasaan yang menunjukkan identitasnya sebagai kaum berkuasa. Istilah “bawah” berelevansi dengan pengusaha, pemilik instansi, dan masyarakat kaum lemah yang menunjukkan identitas sebagai kaum tertindas yang harus mematuhi ideologi pemerintah.

Ketiga, dimensi sosiokultural praktik adalah realitas wacana yang dibangun oleh pemerintah berupa kebijakan-kebijakan secara implisit bermuatan ideologi yang mengakibatkan bentuk marginalisasi terhadap masyarakat dan dominasi sosial. Sedangkan, masyarakat memiliki identitas sebagai kaum lemah dan tertindas, bersikap apatis, tidak percaya dengan kebijakan. Terdapat interaksi sosial tidak seimbang (*social wrong*) berakibat pada bentuk-bentuk perlawanan berupa aksi demonstrasi dan aksi-aksi anarkistis.

Daftar Pustaka

- Abd-Alrazaq, A., Alhuwail, D., Househ, M., Hai, M., & Shah, Z. (2020). Top concerns of tweeters during the COVID-19 pandemic: A surveillance study. *Journal of Medical Internet Research, 22*(4), 1–9. <https://doi.org/10.2196/19016>
- Ahmad, A. R., & Murad, H. R. (2020). The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19 Pandemic in Iraqi Kurdistan: Online Questionnaire Study. *Journal of Medical Internet Research, 22*(5). <https://doi.org/10.2196/19556>
- Ahmed, W., Vidal-Alaball, J., Downing, J., & López Seguí, F. (2020). COVID-19 and the 5G Conspiracy Theory: Social Network Analysis of Twitter Data. *Journal of Medical Internet Research, 22*(5). <https://doi.org/10.2196/19458>
- Asad, S., Noor, S. N. F. B. M., Indah, R. N., & Jaes, L. Bin. (2021). Attitude Realization in News Reports: An Interpretation Through an Appraisal Analysis. *Indonesian Journal of Applied Linguistics, 11*(1), 177–186. <https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34622>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Cenderamata, R. C., & Darmayanti, N. (2019). Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring. *Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya, 3*(1), 1–8. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/literasi/article/view/1736>
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Fitriani, S. S., Ananda, R., Irawan, A. M., Samad, I. A., & Weda, S. (2021). Representation of 212 Rallies in the Jakarta Post Articles: A Hybridity of CDA and SFL Analysis. *Studies in English Language and Education, 8*(1), 328–345. <https://doi.org/10.24815/siele.v8i1.16836>
- Hwita, G. (2019). Analisis Wacana Kritis dan Studi Bahasa Kritis dalam Pengajaran BIPA. *MABASAN, 2*(2), 23–43. <https://doi.org/10.26499/mab.v2i2.133>
- Lemenager, T., Neissner, M., Koopmann, A., Reinhard, I., Georgiadou, E., Müller, A., Kiefer, F., & Hillemacher, T. (2020). COVID-19 Lockdown Restrictions and Online Media Consumption in Germany. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(1), 1–13. <https://doi.org/10.3390/ijerph18010014>
- Maravia, U., Bekzhanova, Z., Ali, M., & Alibri, R. (2021). British Muslims Caught Amidst FOGs—A Discourse Analysis of Religious Advice and Authority. *Religions, 12*(2), 1–22. <https://doi.org/10.3390/rel12020140>
- Maulana, M. A. (2020). *KARAKTERISTIK BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL M Arief Maulana Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. 3*.
- Payuyasa, I. N. (2017). Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk dalam Program Acara Mata Najwa di Metro TV. *Segara Widya, 5*, 14–24. <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/segarawidya/article/view/188>

- Putri, N. Q. H., Dianastiti, F. E., & Sumarlam, S. (2022). Narasi Korban Perkosaan pada Pemberitaan di Media Daring RRI Samarinda: Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i1.313>
- Rayani, D., & Purqoti, D. N. S. (2020). Kecemasan Keluarga Lansia terhadap Berita Hoax di Masa Pandemi Covid-19. *Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 906–912. <https://doi.org/10.33394/realita.v5i1.2893>
- Rokhmansyah, A., Mulawarman, W. G., & Hudyono, Y. (2022). Lgbt News on Tirto.id Online Media: Fairclough's Critical Discourse Analysis. *Proceedings of the 6th International Conference on Science, Education and Technology (ISET 2020)*, 191–197. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211125.036>

